

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. UNPAM Press. Banten.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Aria Zurnetti dan Efren Nova. 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Andalas University. Padang.
- dan Fitri Wahyuni. 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Rajawali Press. Depok.
- Cholid Narbuko. 2003. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Fransiska Novita Eleanora. Et. Al. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media. Malang.
- John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. UNNES Press. Semarang.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari. Et. Al. *Kekerasan Seksual*. CV. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Ladito R. Bagaskoro. Et. Al. 2023. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka. Banten.

- M. Irsan Arief. 2021. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Mekar Cipta Lestari. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. Aceh.
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Pasuruan.
- Rifa'I Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha. Lombok.
- Zulkifli Ismail. 2023. *Perlindungan Saksi dan Korban*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 4635).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

C. Jurnal

Altar Adi Unas. *Et.Al.* 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggung Jawaban Pidana". *Lex Crimen*. Volume 11, Nomor 4.

Awilda. *Et. Al.* 2023. "Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan". *UNES Journal of Swara Justisia*. Volume 7, Issue 2.

Anggreany Haryani Putri. 2021. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia". *Jurnal Hukum Pelita*. Volume 2, Nomor 2.

Chindi Oeliga Yensi Afita dan M. Nanda Setiawan. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana". *Datin Law Jurnal*. Volume 3, Nomor 1.

Danu Surya Putra dan Rehnalemken Ginting. 2017. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah

Desa Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)”. *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Volume 6, Nomor 1.

Eky Chaimansyah. 2016. “Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi A De Charge (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana”. *Lex Crime*. Volume V, Nomor 2.

Elvira Susi. 2019. “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP”. *Lex Crimen*. Volume VIII, Nomor 3.

Martins Izha Mahendra dan Rasji. 2024. “Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Saksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan”. *Jurnal Ranah Research*. Volume 6, Nomor 4.

Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat. 2022. “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Hukum Positum*. Volume 7, Nomor 1.

Maykel Runtuwene. 2019. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Penyidikan Dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan”. *Lex Crimen*. Volume VIII, Nomor 5.

Muhammad Bayu Sutantiyo. 2023. “Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan Dengan Perlindungan Anak”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Volume 3, Nomor 2.

Muhammad Johan, Firman Freaddy Busroh, dan Marsudi Utoyo. 2023.

“Analisa Hukum Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 Dihubungkan Keabsahan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Peristiwa Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1, Nomor 3.

Meliana Br Sibarani dan Abdurrahman Alhakim. 2022. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 9, Nomor 2.

Niken Savitri. 2020. “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 4, Nomor 2.

Respati Bayu Kristanto dan Hervina Puspitosari. 2024. “Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby”. *Unes Law Review*. Volume 6, Nomor 2.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.sus/2022/PN Pdg.

E. Skripsi

Jefri Ramadhan. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Jaksa Pinangki Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hukum Putusan Nomor 38/Pid.sus TPK/2020/PN Jkt. Pst dan Putusan Nomor 10/Pid.sus TPK/2021/PT DKI)*. Skripsi

Universitas Andalas. Padang.

F. Internet

Renie Aryandani. *“Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya”*. <https://www.hukumonline.com/>. Dikunjungi pada tanggal 24 Desember 2024 Jam 17.55 WIB.

G. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *“Definisi Putusan Pengadilan”*. KBBI tersedia pada Pencarian – KBBI VI Daring (Kemdikbud.go.id). Diakses pada tanggal 3 Februari 2025.

